



EDISI SENIN 19 OKTOBER 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY



Ricuh di Jalanan Prancis

Gambar ini menunjukkan kebakaran di gedung kantor pariwisata (Pavillon de Bellecour) di Place Bellecour, Lyon, Prancis, yang dibakar oleh para demonstran selama aksi unjuk rasa nasional menuntut penurunan biaya hidup dan krisis ekonomi pada Sabtu (17/10). Aksi yang diikuti ratusan ribu orang di berbagai kota itu diwarnai bentrokan dengan polisi, penjarahan toko, serta pembakaran bangunan, termasuk Balai Kota Limoges. Hingga Minggu (18/10) hampir 1.800 orang ditangkap dan ratusan petugas terluka. Baca berita lengkap Hal.7.(dok.ist)

7 PERUSAHAAN DI INDONESIA YANG LAHANNYA MENJADI SUMBER TITIK API

Grup Sinar Mas (APP)

1. PT Bumi Andalas Permai (BAP)
2. PT Bumi Mekar Hijau (BMH)
3. PT SBA Wood Industries
4. PT Bangkanesia

Non-Sinar Mas

5. PT Paramitra Mulia Langgeng (Sungai Budi Group)
6. PT Sumatera Alam Anugerah (Independen)
7. PT Hutan Lestari Raya (Independen)

6 Enam Negara Terdampak Asap

- **Malaysia:** Sekolah di Sarawak ditutup akibat kabut asap.
- **Singapura:** PM2.5 di wilayah barat mencapai 288 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (14 Oktober 2026).
- **Brunei Darussalam:** Warga mengeluhkan batuk dan iritasi mata.
- **Filipina:** Sejumlah sekolah beralih ke pembelajaran daring.
- **Thailand:** Asap terdeteksi hingga wilayah selatan.
- **Vietnam:** Asap terdeteksi hingga wilayah selatan.

Empat Bulan Karhutla di Kalimantan

SINGAPURA TUNJUK HIDUNG 7 PERUSAHAAN, MALAYSIA DESAK RI DIKUCILKAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sudah berlangsung 4 bulanan memicu krisis kabut asap lintas negara. Singapura mengidentifikasi tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga terkait kebakaran. National Environment Agency (NEA) atau Badan Lingkungan Nasional yang berada di bawah Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura bersiap mengirimkan surat. Dari 7 perusahaan yang dituding biang kerok karhutla yang menghasilkan polusi asap hingga ke Singapura, sebanyak 4 perusahaan adalah milik Keluarga Widjaja (Sinarmas Group). Melalui jaringan Asia Pulp & Paper (APP) ada nama PT Bumi Andalas Permai (BAP), PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT SBA Wood Industries, dan PT Bangkanesia. Sementara sisanya adalah PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatera Alam Anugerah Independen dan PT Hutan Lestari Raya Independen. Sementara seruan agar Indonesia mendapat tekanan hingga dikucilkan dari kerja sama regional muncul dari politisi Malaysia. Di dalam negeri, DPR mendesak pemerintah membuka data perusahaan pemegang konsesi yang lahannya terbakar. Darurat asap bukan isapan jempol, karena sudah terdeteksi memasuki atmosfer Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Bahkan, Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) di Singapura mengaktifkan status peringatan Level 3 untuk kawasan selatan ASEANm Tingkat tertinggi yang diaktifkan ketika terdapat risiko tinggi terjadinya kabut asap lintas batas negara yang parah. Sementara, ekonom menghitung kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 diperkirakan mencapai Rp 167 triliun hingga pertengahan Oktober. Krisis berulang inipun kembali menyoroti penegakan hukum, transparansi konsesi dan persoalan tata kelola hutan. BERSAMBUNG HAL.11

KERUGIAN KARHUTLA 2026

Kerugian Ekonomi Berpotensi Rp 204 Triliun

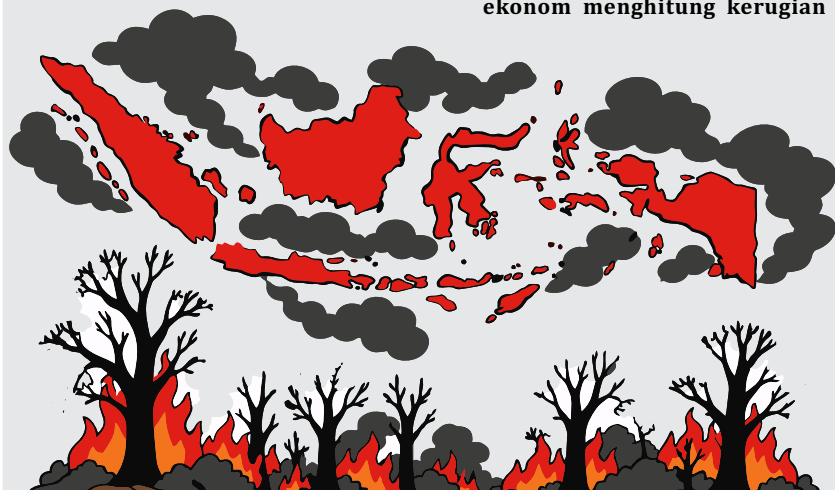
- **Rp 167 triliun** estimasi kerugian hingga pertengahan Oktober 2026.
- **Rp 204 triliun** potensi kerugian jika kebakaran menyerupai skala 2015 dan 2019.
- **Setara 0,79 persen** PDB Indonesia.
- **Sektor pertanian:** Rp 50 triliun.
- **Kehutanan:** Rp 41 triliun.
- **Emisi karbon:** Rp 41 triliun.

Sumber: Teguh Yudo Wicaksono; estimasi berbasis pemodelan.

Estimasi Dampak Ekonomi & Kesehatan

- **Rp 123,1 triliun:** estimasi CELIOS untuk Januari–Agustus 2026.
- **Rp 123,1 triliun** setara 49,1 persen proyeksi PDRB Kalimantan Tengah.
- **Rp 29,54 triliun:** kerugian aset fisik dan terganggunya aktivitas ekonomi.
- **Rp 269,86 miliar:** potensi penurunan penerimaan pajak daerah bersih.

Sumber: CELIOS.



02

GOVERNMENTTODAY
Prabowo Bertemu Sekjen PBB di Hambalang,
Diplomasi Perdamaian Jadi Sorotan

05

NUSANTARA
MAKI Endus Nusron di Malaysia saat
Mangkir 2 Kali dari Panggilan KPK

10

LISTSTYLE
Makeup Antiluntur dan Flawless saat Konser

Mengutip keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo menyambut langsung Guterres saat turun dari kendaraan. Keduanya kemudian berjalan menuju pendopo untuk sesi foto bersama sebelum menggelar pertemuan bilateral dengan delegasi masing-masing.

Penyambutan tersebut turut diwarnai kehadiran anak-anak yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam foto yang dirilis Sekretariat Presiden, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Armanatha Christiwana Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Sementara itu, Guterres tampak didampingi Retno Marsudi, mantan Menlu RI yang kini menjabat Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Air.

Menurut keterangan resmi pemerintah, pertemuan membahas sejumlah isu strategis global serta upaya memperkuat komunikasi dan kerja sama multilateral. Kerja sama itu diarahkan untuk mendorong perdamaian, menjaga stabilitas, dan mencari penyelesaian persoalan internasional melalui jalur multilateral.

Meski demikian, pemerintah belum memerinci persoalan yang menjadi prioritas pembahasan, termasuk apakah kedua pihak membicarakan konflik tertentu, agenda reformasi PBB, atau langkah diplomatik baru. Belum ada pula keterangan mengenai kesepakatan maupun tindak lanjut konkret dari pertemuan di Hambalang.

Kunjungan Guterres ke Indonesia berlangsung pada 17-19 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan Wakil Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq, agenda

PRABOWO BERTEMU SEKJEN PBB DI HAMBALANG, DIPLOMASI PERDAMAIAN JADI SOROTAN

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/10/2026). Pertemuan bilateral ini berlangsung di tengah upaya memperkuat kerja sama Indonesia-PBB, termasuk dalam mendorong perdamaian dan menjaga stabilitas internasional. Namun, pemerintah belum merinci isu spesifik yang dibahas maupun hasil konkret pertemuan tersebut.



Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja Sekjen PBB Antonio Guterres di Hambalang, Minggu (18/10/2026). (Dok.Setpres)

lawatan tersebut tidak hanya mencakup pertemuan dengan Prabowo, tetapi juga kunjungan ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Kabupaten Bogor.

Di PMPP TNI, Guterres dijadwalkan bertemu dengan personel Indonesia yang akan bertugas dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah, yakni United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA).

Ia juga dijadwalkan memberikan penghormatan kepada 50 personel

penjaga perdamaian Indonesia yang gugur saat bertugas di bawah bendera PBB. Rangkaian agenda tersebut menempatkan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian internasional sebagai salah satu sorotan kunjungan Guterres.

Selain itu, Guterres dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai masa depan multilateralisme di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta. Agenda ini relevan dengan upaya memperkuat peran kerja sama antarnegara dalam menghadapi persoalan global yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak. Namun, isi

pidato tersebut belum dapat diperlakukan sebagai hasil atau kesimpulan dari pertemuan bilateral di Hambalang.

Pertemuan Prabowo dan Guterres kali ini melanjutkan komunikasi keduanya yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada 22 September 2025. Mereka bertemu setelah Prabowo menyampaikan pidato dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.

Persoalan Palestina menjadi salah satu konteks penting dalam diplomasi Indonesia di forum internasional. Indonesia mendukung penyelesaian konflik melalui solusi dua negara, yakni pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat serta hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel.

Meski pertemuan di New York pada 2025 berlangsung dalam rangkaian diplomasi untuk mendorong penyelesaian damai atas persoalan Palestina, belum ada keterangan resmi bahwa isu tersebut menjadi pokok pembahasan khusus dalam pertemuan di Hambalang kali ini. (tin, ant, rls/dya)

DUGAAN PENGAMBUKAN KARYAWAN, KORWIL SPPG PURWAKARTA DICOPOT

Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Korwil SPPG) Purwakarta berinisial GD dicopot dari jabatannya menyusul dugaan penganiayaan terhadap seorang karyawan melalui aksi pencambukan di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kota Bogor.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggelar sidang etik untuk mendalami peristiwa tersebut sekaligus menentukan status GD sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"Benar dicopot sebagai Korwil di Purwakarta. Kalau yang korbannya termasuk yang akan ditanya menjadi saksi," ujar Kepala SPPG Bogor, Haidir, saat dihubungi wartawan, Minggu (18/10/2026).

Haidir menjelaskan, sidang etik akan diselenggarakan oleh BGN pusat melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dan Deputi Pemantauan dan Pengawasan. Forum tersebut akan menggali kronologi serta motif di balik dugaan pencambukan sebelum

menentukan langkah selanjutnya terhadap GD.

"Ya besok baru akan disidang etikan. Dia dikasih kesempatan untuk menjelaskan, sebelum diputuskan (statusnya). Untuk memberikan klarifikasi untuk tim etik mendalami seperti apa kejadiannya dan segala macam. Besok disidang itu akan didalamin," kata Haidir.

Sebelumnya, Polresta Bogor Kota membenarkan adanya dugaan penganiayaan di KPPG Kota Bogor, kawasan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Kamis (15/10/2026) malam setelah menerima informasi mengenai

peristiwa tersebut.

Kasi Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Imam, menyebut GD diduga melakukan penganiayaan terhadap RAN, yang merupakan salah satu Kepala SPPG Purwakarta. "Dan korban adalah salah satu Kepala SPPG Purwakarta, Saudara RAN," kata Imam pada Sabtu (17/10/2026).

Menurut Imam, Kepala KPPG Bogor, Haidir, sempat mendengar teriakan dan menegur agar tidak terjadi penganiayaan di lingkungan kantornya. Haidir juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan melalui musyawarah antara kedua belah pihak.

"Menurut Kepala KPPG (Saudara

Haidir), permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak," ujar Imam.

Meski demikian, polisi telah memeriksa lokasi kejadian, mengecek rekaman kamera pengawas (CCTV), dan meminta keterangan saksi-saksi. Polresta Bogor Kota juga mengarahkan Kepala KPPG Bogor agar mendorong korban membuat laporan polisi.

Hingga informasi ini disampaikan, belum ada keterangan mengenai hasil akhir penyelidikan kepolisian maupun keputusan sidang etik BGN terhadap GD. (tin, tir/dya)

CANDAAN TRUMP SOAL MUHAMMAD PICU KRITIK, DPR MINTA KEMLU BERSIKAP

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menuai sorotan atas retorikanya terhadap umat Islam. Kali ini, Trump menjadikan nama Muhammad sebagai bahan candaan ketika menyindir kepemimpinan Iran dalam kampanye politik di Dalton, Georgia, Jumat (16/10/2026). Di Indonesia, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencermati pernyataan tersebut dan mempertimbangkan langkah diplomatik yang tepat.



Presiden Donald Trump setelah berbicara dalam sebuah jamuan makan malam di klub miliknya, Mar-a-Lago, pada Jumat, (16/10/2026) di Palm Beach, Florida.(AP)

Pernyataan Trump menambah daftar kontroversi yang selama bertahun-tahun mengiringi sikap dan retorikanya terhadap Muslim. Sejumlah kelompok pembela hak asasi manusia dan organisasi advokasi Muslim menilai pernyataan maupun kebijakannya kerap menggambarkan umat Islam, imigran, dan kelompok etnis minoritas secara negatif. Kritik itu kembali mengemuka di tengah kampanye pemilihan paruh waktu Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026.

"Menurut saya, setiap pemimpin dunia perlu mempertimbangkan dampak dari pernyataannya, terutama ketika menyangkut simbol, nama, atau hal-hal yang memiliki makna penting bagi suatu agama. Kebebasan berpendapat tetap perlu disertai tanggung jawab dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain," kata Dave, Minggu (18/10/2026).

Dave menilai nama Muhammad memiliki makna religius yang mendalam bagi umat Islam. Karena itu, penggunaannya sebagai bahan lelucon dalam konteks politik perlu dicermati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau melukai perasaan umat beragama.

"Saya memandang Kemlu RI perlu mencermati pernyataan tersebut dan menilai langkah diplomatik yang tepat. Jika dipandang perlu, komunikasi dapat dilakukan untuk menyampaikan pentingnya menghormati sensitivitas keagamaan, tanpa harus terburu-buru mengambil

langkah yang berpotensi memperkeruh hubungan bilateral," ujarnya.

Saat Kampanye di Georgia

Trump melontarkan pernyataan itu ketika membahas Iran dalam kampanye untuk para kandidat Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu. Acara tersebut berlangsung di sebuah hanggar di Bandara Kota Dalton, Georgia.

"Jika Anda ragu dengan nama seseorang dari Timur Tengah, cukup sebut saja 'Muhammad,'" kata Trump di hadapan massa, dikutip Reuters.

"Peluang Anda benar sekitar 65 persen. 'Halo, Mohammad.' Saya sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah salah," lanjutnya.

Trump kemudian berpura-pura bertanya kepada sejumlah orang bernama Mohammad apakah mereka bersedia menjadi presiden Iran. Ia sebelumnya menyebut Iran sebagai satu-satunya negara yang tidak seorang pun ingin menjadi presidennya.

Candaan tersebut mendapat respons relatif datar dari para hadirin. Nama Mohammad sendiri merupakan salah satu nama laki-laki yang umum digunakan di kalangan umat Islam. Banyak keluarga Muslim memberikan nama tersebut kepada anak laki-laki untuk menghormati Nabi Muhammad, tokoh sentral dalam agama Islam.

Dalam pidato yang sama, Trump kembali menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir.

Pernyataan itu disampaikan sekitar tujuh bulan setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran, yang salah satu tujuannya adalah melumpuhkan program nuklir Teheran.

Kontroversi terbaru ini mengingatkan kembali pada pernyataan Trump saat mencalonkan diri sebagai presiden AS pada 2015. Pada 7 Desember tahun itu, ia menyerukan penghentian total dan menyeluruh terhadap masuknya Muslim ke Amerika Serikat sampai pemerintah dapat menentukan langkah untuk menghadapi ancaman yang disebutnya berkaitan dengan terorisme.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu kontroversi besar dalam kampanye pertamanya. Trump ketika itu mengaitkan kebijakan pembatasan Muslim dengan persoalan keamanan nasional. Seruan tersebut menuai kritik dari kelompok pembela kebebasan sipil dan hak-hak imigran karena dinilai mendiskriminasi orang berdasarkan agama.

Kontroversi berlanjut setelah Trump menjabat presiden pada Januari 2017. Pemerintahannya menerbitkan kebijakan pembatasan perjalanan yang menyasar warga sejumlah negara mayoritas Muslim, termasuk Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Kebijakan tersebut memicu demonstrasi di sejumlah bandara dan gugatan hukum.

Trump membantah bahwa kebijakan itu merupakan larangan terhadap Muslim. Dalam pernyataan resmi pada 29 Januari 2017, ia

TIMELINE KONTROVERSI TRUMP SOAL ISLAM

2015

Serukan larangan Muslim masuk AS.

2017

Terbitkan kebijakan pembatasan perjalanan dari sejumlah negara mayoritas Muslim.

2023

Janjikan perluasan larangan perjalanan dan pembatasan pengungsi dari Gaza.

2026

Kembali melontarkan retorika kontroversial terhadap Muslim Amerika dan warga keturunan Somalia.

16 Oktober 2026

Jadikan nama "Mohammad" bahan candaan saat menyindir Iran di Georgia. Klaim peluang menebak nama itu mencapai 65 persen.

menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya melindungi Amerika Serikat dari ancaman terorisme. Namun, latar belakang seruan kampanyenya pada 2015 membuat kebijakan tersebut terus diperdebatkan.

Pada Oktober 2023, ketika berkampanye untuk kembali menjadi presiden, Trump juga berjanji melarang pengungsi dari Gaza masuk ke Amerika Serikat dan menghidupkan kembali sekaligus memperluas pembatasan perjalanan yang sebelumnya dikenal sebagai Muslim ban. Ia turut mengusulkan penyaringan ideologis terhadap calon imigran.

Dalam kampanye menjelang pemilu paruh waktu 2026, Trump juga melontarkan pernyataan yang menyasar warga Amerika keturunan Somalia dan Muslim Amerika. Di antara tokoh yang menjadi sasaran retorikanya adalah Abdul El-Sayed, kandidat Partai Demokrat untuk Senat AS, serta Ilhan Omar, anggota DPR AS dari Partai Demokrat yang mewakili Minnesota dan datang ke Amerika Serikat sebagai pengungsi dari Somalia.

Kelompok advokasi Muslim menilai retorika semacam itu berisiko memperkuat stereotip negatif terhadap komunitas Muslim dan kelompok minoritas. Kritik tersebut juga berkaitan dengan kebijakan pemerintahannya mengenai imigrasi dan tindakan terhadap demonstrasi pro-Palestina.

Laporan tahunan Council on American-Islamic Relations (CAIR) yang dirilis pada awal 2026 mengaitkan peningkatan Islamofobia di Amerika Serikat, antara lain, dengan pengetatan kebijakan imigrasi dan tindakan keras terhadap demonstrasi pro-Palestina selama masa jabatan kedua Trump.(rt,dtc,ist/dya)

PASAR SAHAM RI TERANCAM TURUN KASTA, RUPIAH DAN SUN BISA BABAK BELUR

Ancaman perubahan status dari emerging market menjadi standalone market membayangi IHSG, nilai tukar rupiah, dan pembiayaan pemerintah. MSCI menyoroti transparansi kepemilikan saham dan integritas perdagangan pasar modal Indonesia. RI punya waktu hingga Juni 2027 untuk membuktikan reformasi pasar modal berjalan nyata.

Pasar modal Indonesia menghadapi tekanan setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuka konsultasi untuk menurunkan klasifikasi saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Ancaman tersebut tak hanya menyangkut posisi Indonesia dalam indeks saham global, tetapi juga berpotensi memengaruhi arus modal asing, nilai tukar rupiah, hingga biaya pembiayaan pemerintah.

Guncangan terlihat pada perdagangan Jumat (16/10/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 11,57 persen ke kisaran 5.200, mencatatkan penurunan harian terdalam sejak krisis moneter 1998. Nilai saham Indonesia yang hilang diperkirakan mencapai 65 miliar dolar AS, menurut Reuters. Rupiah juga melemah di tengah kekhawatiran investor terhadap prospek pasar keuangan domestik.

MSCI dikutip Minggu (18/10/2026) mengumumkan konsultasi tersebut pada 15 Oktober 2026. Penyedia indeks global itu menilai kemajuan reformasi pasar modal Indonesia belum cukup konsisten untuk mengatasi persoalan yang telah disorot sejak awal tahun. Karena itu, MSCI mengusulkan perubahan klasifikasi menjadi standalone market, kategori yang berada di luar kelompok indeks emerging market maupun frontier market.

MSCI menjadwalkan penerimaan masukan dari pelaku pasar hingga 30 April 2027 dan akan mengumumkan keputusan final paling lambat akhir Juni 2027. Selama proses tersebut, pembekuan sejumlah perubahan indeks saham Indonesia tetap berlaku. Dengan demikian, Indonesia belum resmi turun status, tetapi menghadapi risiko reklasifikasi apabila tidak ada bukti perbaikan tata kelola dan fungsi pasar yang berarti.

Persoalan utama yang disorot MSCI adalah ketidakjelasan struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta minimnya bukti penegakan aturan yang efektif. Ketiga hal tersebut berkaitan dengan kemampuan investor untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya suatu saham, berapa banyak saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan publik,



dan apakah harga terbentuk secara wajar.

Dalam evaluasi klasifikasi pasar pada Juni 2026, MSCI telah menyampaikan kekhawatiran investor terhadap kelayakan investasi di pasar saham Indonesia. Otoritas Indonesia kemudian mengumumkan sejumlah langkah reformasi, termasuk peningkatan keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen, pengungkapan klasifikasi investor yang lebih terperinci, pelaporan konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan batas minimum saham beredar di publik (free float) menjadi 15 persen.

Namun, menurut MSCI, pengumuman kebijakan tersebut belum cukup. Investor institusional menginginkan implementasi yang konsisten dan bukti bahwa perubahan itu benar-benar memperbaiki kondisi pasar. MSCI juga menilai penurunan status hanya menjadi frontier market tidak akan mencerminkan tingkat persoalan yang mereka temukan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui perlunya menunjukkan kemajuan reformasi secara konkret. Menurut dia, investor dalam negeri maupun luar negeri perlu melihat hasil nyata dari langkah perbaikan yang telah dijanjikan otoritas.

"Ini menjadi catatan bagi kita ke depan bahwa reformasi itu harus dijalankan dan progresnya itu harus kelihatan, terutama progresnya harus kelihatan bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri," kata Airlangga.

Airlangga juga menyatakan

pemerintah akan membahas persoalan tersebut bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Bank Indonesia (BI). Pembahasan itu diharapkan menghasilkan langkah konkret beserta jadwal pelaksanaan yang jelas.

Risiko Menjalar Surat Utang

Dampak ancaman MSCI tidak terbatas pada perdagangan saham. Jika Indonesia benar-benar dikeluarkan dari indeks global yang menjadi acuan pengelola dana internasional, sebagian investor berpotensi mengurangi kepemilikan saham domestik. Reuters mengutip estimasi UBS bahwa perubahan status tersebut dapat memicu arus keluar sekitar 4 miliar dolar AS dari dana pasif, sementara investor aktif berpotensi menambah arus keluar hingga 15 miliar dolar AS. Angka tersebut merupakan estimasi risiko, bukan jumlah dana yang dipastikan keluar.

Tekanan arus modal dapat merembet ke nilai tukar. Pada Jumat (16/10/2026), rupiah dibuka melemah 83 poin atau 0,46 persen ke Rp18.021 per dolar AS, dibandungkan penutupan sebelumnya Rp17.938.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pengumuman MSCI menjadi salah satu faktor yang menekan rupiah, di tengah tekanan eksternal dari inflasi Amerika Serikat dan perkembangan kebijakan moneter global.

Tekanan terhadap aset keuangan juga berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah. Investor.id melaporkan bahwa imbal hasil atau yield Surat Utang Negara (SUN)

Mengapa Status Indonesia Jadi Sorotan?

Pada 15 Oktober 2026, MSCI mengusulkan reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Kekhawatiran yang disorot MSCI meliputi:

- Transparansi struktur kepemilikan saham.
- Dugaan perilaku perdagangan terkoordinasi.
- Bukti penegakan hukum yang dinilai belum memadai.

Keputusan final ditargetkan paling lambat 30 Juni 2027. Sebelum itu, MSCI membuka konsultasi dan mempertimbangkan bukti perbaikan tata kelola serta fungsi pasar Indonesia.

4 Negara dari Kawasan Amerika.

Berdasarkan data per 17 Oktober 2026, negara yang masuk klasifikasi Standalone Market MSCI dari kawasan Amerika adalah:

- Argentina
- Panama
- Jamaika
- Trinidad dan Tobago

Kawasan EMEA

8 Negara dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

Negara yang termasuk dalam klasifikasi Standalone Market MSCI dari kawasan EMEA adalah:

- Bulgaria
- Bosnia dan Herzegovina
- Lebanon
- Palestina
- Malta
- Ukraina
- Nigeria
- Zimbabwe

berpotensi naik hingga 7,45 persen akibat memburuknya persepsi risiko terhadap aset Indonesia dan kemungkinan perubahan arus modal.

Kenaikan yield berarti pemerintah berpotensi harus menawarkan imbal hasil lebih tinggi ketika menerbitkan surat utang baru. Namun, angka 7,45 persen tersebut merupakan proyeksi yang diterbitkan Investor.id, bukan kepastian bahwa imbal hasil SUN akan mencapai level itu.

Di tengah tekanan tersebut, pasar menantikan Rapat Dewan Gubernur BI pada 20–21 Oktober 2026. BI-Rate tercatat sebesar 5,75 persen.

Keputusan suku bunga menjadi perhatian karena otoritas moneter harus mempertimbangkan stabilitas rupiah, arus modal, dan risiko inflasi, tanpa mengabaikan kondisi pertumbuhan ekonomi.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi sorotan MSCI. Turki juga mengalami pembekuan sejumlah penyesuaian indeks saham sejak 15 Oktober 2026 akibat kekhawatiran terhadap transparansi kepemilikan dan dugaan perdagangan terkoordinasi. MSCI memperingatkan bahwa jika kemajuan reformasi tidak memadai hingga Juni 2027, klasifikasi pasar saham Turki dapat ditinjau untuk kemungkinan perubahan menjadi frontier market atau standalone market. (tin,ist,ant/dya)

MAKI ENDUS NUSRON DI MALAYSIA SAAT MANGKIR 2 KALI DARI PANGGILAN KPK

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menduga Nusron Wahid bepergian ke Malaysia ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadapnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Boyamin meminta KPK menelusuri keberadaan Nusron sekaligus mempertimbangkan langkah hukum agar pemeriksaan terhadapnya dapat dilakukan.

Menurut Boyamin, berdasarkan penelusuran MAKI, Nusron berangkat dari Jakarta menuju Batam pada Rabu (14/10/2026). Ia kemudian diduga menyeberang menggunakan kapal feri ke Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Johor Bahru, Malaysia. Perjalanan tersebut berlangsung sehari sebelum jadwal pemeriksaan Nusron di KPK pada Kamis (15/10/2026).

"Berdasarkan penelusuran kami, Nusron Wahid pada hari Rabu telah bepergian ke Malaysia. Diduga lewat Batam dan Singapura. Jadi, penerbangan dari Jakarta ke Batam, menyeberang pakai kapal feri ke Singapura, dari Singapura kemudian menyeberang ke Malaysia, yaitu Johor

Bahru," ujar Boyamin, seperti dikutip Minggu (18/10/2026).

Boyamin menyebut Nusron berada di Johor Bahru pada hari pemeriksaan KPK. Ia juga mengklaim Nusron kembali ke Singapura pada Jumat (16/10/2026), berada di negara tersebut pada Minggu (18/10/2026), dan diperkirakan kembali ke Indonesia pada Selasa (20/10/2026). Informasi mengenai rute dan keberadaan Nusron tersebut merupakan keterangan Boyamin yang masih perlu dikonfirmasi secara independen.

Boyamin turut mempertanyakan apakah perjalanan itu dilakukan untuk kepentingan dinas atau pribadi. Menurut dia, perjalanan seorang menteri ke luar negeri memerlukan izin Presiden. Ia meragukan adanya izin untuk perjalanan yang disebutkan berlangsung mendadak tersebut. "Nah, kalau mendadak itu apakah ada izin, saya ragu," katanya. Namun,

dugaan mengenai status perjalanan dan izin tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terverifikasi.

Di sisi lain, KPK telah menyatakan mempertimbangkan langkah hukum setelah Nusron dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik belum memperoleh konfirmasi mengenai alasan ketidakhadiran Nusron pada pemanggilan kedua, Kamis (15/10/2026).

"Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik untuk seperti apa, karena tentu KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum juga dapat dilakukan secara efektif," kata Budi pada Kamis malam.

Pada pemanggilan pertama, Nusron disebut beralasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Namun, pada pemanggilan ulang, ia

kembali tidak hadir tanpa memberikan penjelasan kepada penyidik. Boyamin menilai KPK dapat mempertimbangkan upaya membawa Nusron untuk menjalani pemeriksaan. Ia berpendapat ketidakhadiran tanpa alasan dapat menjadi dasar untuk mengambil langkah lebih lanjut, meski keputusan mengenai tindakan paksa tetap berada pada kewenangan penyidik sesuai ketentuan hukum.

Pemeriksaan Nusron berkaitan dengan penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN. KPK telah menetapkan delapan tersangka, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri; serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron. (gus,ist,ant/dya)

Minggu, 18 Oktober 2026

BENCANA ALAM DI INDONESIA

Gempa Bumi NTT (M 5,2 & M 4,1)

Mengguncang wilayah Labuan Bajo dan Ruteng (Manggarai) pada pukul 15.00 WIB. Getaran dirasakan cukup kuat di darat, namun tidak berpotensi tsunami.

Erupsi Gunung Semeru (Jawa Timur):

Mengalami 29 kali gempa letusan hari ini. Status berada di Level III (Siaga) dengan larangan aktivitas di sepanjang jalur Besuk Kobokan.

Erupsi Gunung Ibu (Maluku Utara):

Mencatat 86 kali gempa letusan hari ini dengan kolom abu tebal. Status berada di Level II (Waspada).

Banjir Rob Pesisir Jakarta:

Hari ini merupakan puncak peringatan dini pasang air laut maksimum yang mengancam 12 wilayah pesisir Jakarta Utara.

Anak Krakatau Erupsi Lagi, Kolom Abu 100 M

Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung, kembali mengalami erupsi pada Minggu (18/10/2026) siang. Kolom abu teramati mencapai sekitar 100 meter di atas puncak atau 257 meter di atas permukaan laut. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) masih menetapkan status gunung api tersebut pada Level III atau Siaga.

Berdasarkan laporan PVMBG melalui laman Magma Indonesia, erupsi terjadi pada pukul 12.59 WIB. Kolom abu berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal dan bergerak condong ke arah timur laut. Aktivitas tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 56 milimeter dan durasi sekitar 36 detik. Meski terjadi erupsi, tidak terdengar suara dentuman.

Dalam status Siaga, PVMBG merekomendasikan masyarakat, pengunjung, dan wisatawan tidak memasuki wilayah dalam radius lima kilometer dari pusat erupsi. Masyarakat juga dilarang memasuki atau beraktivitas dalam radius satu kilometer



Aktivitas Anak Krakatau. (dok. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG))

dari pulau baru di sektor barat laut dan tenggara Gunung Anak Krakatau.

PVMBG mengingatkan sejumlah potensi bahaya yang perlu diwaspadai di sekitar gunung api tersebut. Ancaman itu meliputi lontaran batu pijar, hujan abu lebat, aliran lava, serta erupsi sekunder yang dapat terjadi akibat kontak material lava panas dengan air laut maupun air hujan. Potensi bahaya tersebut menjadi alasan masyarakat diminta mematuhi batas

wilayah aman yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Banten dan Lampung diimbau tetap tenang serta tidak mudah mempercayai informasi yang menyebut erupsi Anak Krakatau akan menyebabkan tsunami. PVMBG mengarahkan masyarakat untuk mengikuti informasi resmi dan arahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Gempa bumi bermagnitudo 5,3

mengguncang wilayah timur laut Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu (18/10/2026) pukul 15.00 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa yang berpusat di laut dengan kedalaman 10 kilometer tersebut tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,09 derajat Lintang Selatan dan 120,26 derajat Bujur Timur, sekitar 60 kilometer timur laut Labuan Bajo. Informasi tersebut tercantum dalam laporan resmi BMKG mengenai gempa bumi bermagnitudo 5,0 ke atas. (wid,ant,ist/dya)

Masih Ada 233.800 Penduduk Miskin di Kabupaten Malang

MALANG- Dalam setahun, persentase penduduk miskin di Kabupaten Malang turun tipis sebanyak 0,11 poin, dari 8,78 persen pada Maret 2025 menjadi 8,67 persen pada Maret 2026. Meski mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut masih mencapai sekitar 233.800 jiwa.

"Persentase penduduk miskin di Kabupaten Malang pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,67 persen atau sekitar 233.800 jiwa. Angka ini turun 0,11 poin persentase dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 8,78 persen atau sekitar 235.630 jiwa," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, Dewi Fitriana, dalam keterangan resminya yang diterima pada Minggu (18/10/2026).

Di balik penurunan jumlah penduduk miskin tersebut, BPS mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 0,90 pada Maret 2025 menjadi 0,94 pada Maret 2026. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga naik dari 0,15 menjadi 0,21 pada periode yang sama.

Menurut Dewi, Indeks Kedalaman

Kemiskinan menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Kenaikan kedua indikator tersebut menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin belum sepenuhnya diikuti perbaikan pada dimensi kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Karena itu, katanya, upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya berorientasi pada pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

"Tantangan lainnya terlihat dari kenaikan Garis Kemiskinan Kabupaten Malang. Pada Maret 2026, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp472.950 per kapita per bulan, meningkat 8,4 persen dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp436.153 per kapita per bulan," ungkap Dewi.

Garis kemiskinan sendiri merupakan batas pengeluaran

minimum yang digunakan untuk menentukan status kemiskinan seseorang. Kenaikan indikator ini menunjukkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga rentan yang berisiko jatuh ke bawah garis kemiskinan ketika menghadapi kenaikan harga atau penurunan pendapatan.

Sementara itu, Dewi juga menjelaskan kondisi Kabupaten Malang dari sisi perekonomian, menurutnya, Kabupaten Malang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,92 persen sepanjang 2025. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sebesar 5,33 persen.



Ilustrasi: Potret kehidupan warga Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang masih hidup di bawah garis kemiskinan. (foto: Prokopim Kab. Malang)

"Kondisi pasar kerja juga menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malang turun dari 5,13 persen pada Agustus 2024 menjadi 5,00 persen pada Agustus 2025," katanya. (Santi/Dya)

Puluhan Ribu KK di Kota Malang Belum Terverifikasi Desil, Mengapa?



Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB), M. Sailendra. (Santi/Lentera)

MALANG- Puluhan ribu data kepala keluarga (KK) di Kota Malang belum terverifikasi dalam pengelompokan desil berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) V3 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengaku hingga saat ini masih menunggu proses pemutakhiran data di tingkat pusat.

"Yang belum masuk itu sudah kami usulkan ke pusat melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian

Sosial (Kemensos) yang nantinya berhubungan dengan BPS pusat. Tetap saja kami juga masih menunggu dari proses itu," ujar Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, M. Sailendra, dikutip pada Minggu (18/10/2026).

Dijelaskannya, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang hanya berwenang mengusulkan data masyarakat untuk diproses lebih lanjut. Penentuan pengelompokan desil bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Sailendra juga mengaku belum mengetahui secara pasti kendala yang menyebabkan puluhan ribu KK tersebut belum masuk dalam pengelompokan desil. Menurutnya, persoalan tersebut berada pada proses di tingkat pusat.

Terkait dampak belum terverifikasinya lebih dari 25 ribu KK

tersebut, Sailendra menduga keluarga yang belum masuk pengelompokan desil mayoritas berada pada desil 6 hingga 10, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi. Namun, ia tidak merinci data yang mendasari dugaan tersebut.

"Mudah-mudahan mereka itu biasanya di desil antara 6-10. Mudah-mudahan seperti itu. Bukan yang membutuhkan bantuan sosial," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, menegaskan pengelompokan masyarakat berdasarkan desil dilakukan oleh BPS pusat, bukan BPS di tingkat daerah. BPS Kota Malang, katanya, tidak melakukan pendataan secara langsung untuk menentukan pengelompokan tersebut.

Menurut Umar, DTSEN dibangun melalui penggabungan berbagai sumber data, di antaranya data Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Data tersebut kemudian dipadankan dengan sumber lain, termasuk data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta data BPJS Kesehatan.

Ia menduga, data puluhan ribu KK yang belum terverifikasi tersebut kemungkinan belum masuk atau belum tercakup dalam proses penggabungan dan pemadanan berbagai sumber data DTSEN. Namun, Umar tidak memastikan penyebab spesifik belum terverifikasinya seluruh KK tersebut.

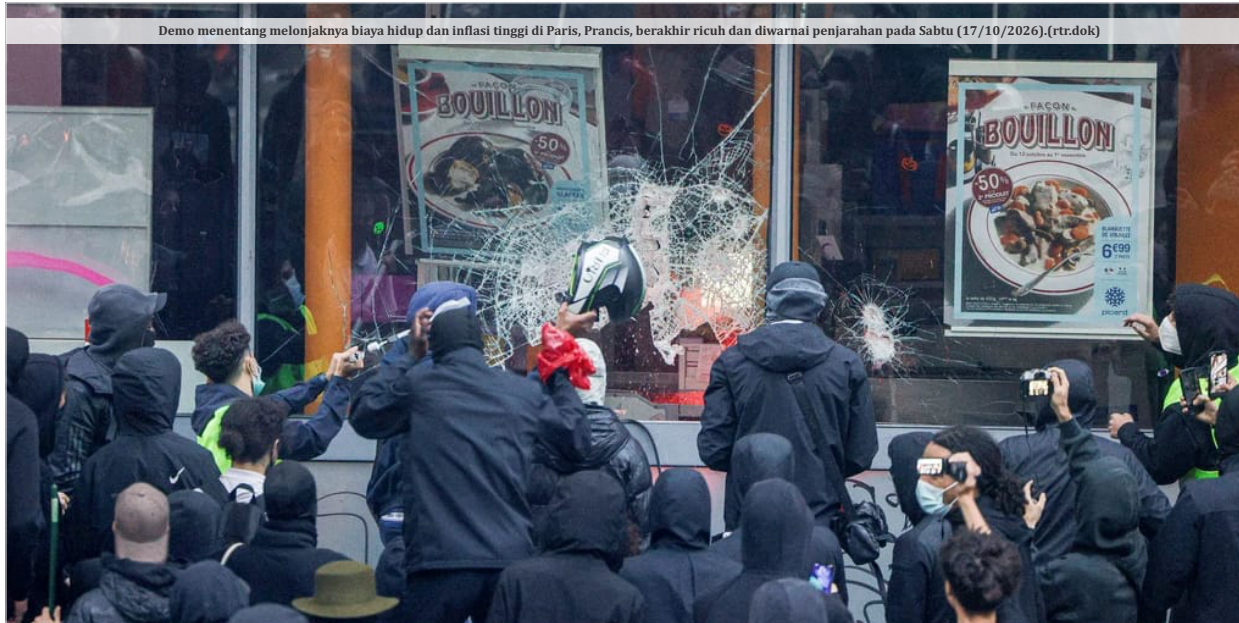
Umar menambahkan, pemutakhiran data DTSEN masih terus berlangsung. Disebutkannya, secara nasional, persentase data yang telah dimutakhirkan baru mencapai 33,13 persen per Juli 2026. "Secara nasional pun baru 33,13 persen per Juli kemarin, itu yang baru dimutakhirkan," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, menyoroti keberadaan 25.472 KK yang disebut belum terverifikasi desil berdasarkan DTSEN V3 2026. (Santi/Dya)

Demo Biaya Hidup Meluas di Eropa

PRANCIS TANGKAP 1.200 ORANG, BELGIA- ITALIA CHAOS

Kerusuhan pecah di sejumlah kota Prancis setelah demonstrasi menentang mahalnnya biaya hidup. Aksi serupa berlangsung di Belgia, Portugal, dan Italia. KBRI Paris mengimbau WNI meningkatkan kewaspadaan.



Demo menentang melonjaknya biaya hidup dan inflasi tinggi di Paris, Prancis, berakhir ricuh dan diwarnai penjarahan pada Sabtu (17/10/2026). (rtr.dok)

Gelombang demonstrasi menentang tingginya biaya hidup melanda sejumlah negara Eropa. Aksi yang dipicu kenaikan harga kebutuhan pokok, upah rendah, mahalnnya hunian, dan persoalan layanan publik itu berlangsung di Prancis, Belgia, Portugal, serta Italia. Di Prancis, demonstrasi meluas menjadi bentrokan dengan polisi, penjarahan toko, dan pembakaran gedung pemerintahan. Perdana Menteri Sébastien Lecornu dikutip Minggu (18/10/2026) menyebut 1.200 orang telah ditangkap dan 150 polisi terluka.

Demonstrasi di Prancis pada Sabtu (17/10/2026) menjadi salah satu aksi terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang turun ke jalan di berbagai wilayah. Sementara itu, serikat pekerja CGT yang ikut dalam aksi menyebut jumlah peserta mencapai 800.000 orang. Perbedaan angka tersebut berasal dari penghitungan masing-masing pihak.

Aksi tersebut melibatkan berbagai kelompok, mulai dari pelajar, mahasiswa, serikat pekerja, hingga pendukung gerakan Rompi Kuning (Yellow Vest). Gerakan Rompi Kuning pernah menggelar demonstrasi besar pada 2018 untuk menentang rencana kenaikan pajak bahan bakar. Kali ini, tuntutan berkembang menjadi protes terhadap kenaikan harga, kondisi layanan publik, dan ketimpangan ekonomi.

Di Strasbourg, Prancis timur, seorang guru bernama Regine Monfroid mengatakan kepada AFP

bahwa masyarakat lelah bekerja dengan upah yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. "Kami muak bekerja keras dengan upah yang hanya cukup untuk hidup dalam kemiskinan, sementara biaya sewa rumah terus naik," ujarnya.

Di Paris, puluhan ribu orang berbaris melintasi wilayah timur dan utara kota. Sebagian demonstran meneriakkan "Semua orang membenci polisi" dan "Macron, mundurlah".

Kamil Alahyan, siswa sekolah menengah berusia 18 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa ia turun ke jalan karena berbagai persoalan, termasuk pemilihan umum 2027, ketidakpercayaan kepada politikus, serta penumpukan kekayaan di kalangan orang superkaya selama satu dekade terakhir.

Sejumlah demonstran juga mengaitkan aksi tersebut dengan Revolusi Prancis 1789. Di Marseille, beberapa orang meneriakkan "Inilah Revolusi, kita merebut Bastille!" ketika menerobos masuk ke kantor wali kota.

Di La Rochelle, demonstran membawa spanduk bertuliskan "Revolusi atau kematian", sedangkan di Montpellier terbentang spanduk biru bertuliskan "Rakyat akan menang".

Ryad Rani, ketua organisasi perwakilan siswa sekolah menengah LSU, mengatakan kepada wartawan di Paris bahwa pemerintah seharusnya memperhatikan kemarahan masyarakat. "Pemerintah sedang gemetar dan memang sudah

seharusnya gemetar, karena ketika rakyat Prancis marah, mereka tidak akan berhenti," katanya.

Toko Dijarah

Demonstrasi yang sebagian besar berlangsung damai berubah menjadi kekerasan di sejumlah lokasi. Kelompok pemuda bertopeng membakar kendaraan dan benda-benda di jalan, menyerang toko, serta bentrok dengan polisi. Aparat menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa yang melemparkan benda ke arah petugas dan menyalakan kembangapi.

Puluhan toko dilaporkan dijarah di Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg. Sasaran penjarahan mencakup supermarket, apotek, butik mewah, toko pakaian, optik, gerai kosmetik, hingga toko elektronik.

Jurnalis AFP di Paris melihat kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas sekitar enam pemuda bergerak secara terorganisasi. Mereka disebut

mengenakan masker dan sarung tangan, memutus sambungan kamera pengawas, lalu memecahkan kaca toko untuk masuk dan mengambil barang.

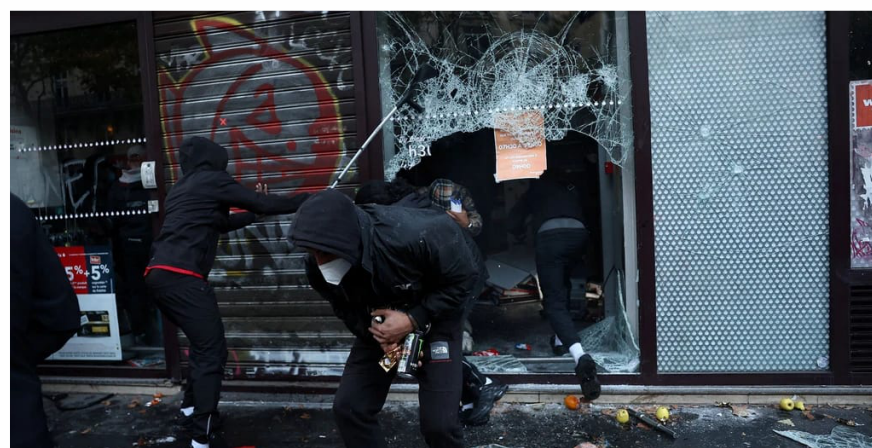
Kerusakan juga terjadi pada bangunan publik. Balai Kota Limoges yang berusia lebih dari 140 tahun sebagian besar hancur akibat kebakaran setelah sekelompok orang menerobos masuk. Balai kota di Marseille dan Lille juga diterobos dan dirusak. Di Bordeaux, sebuah kompleks kepolisian menjadi sasaran, sedangkan kantor pariwisata Lyon dibakar.

Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengecam kekerasan yang disebutnya memiliki "intensitas ekstrem". Ia mengatakan 1.200 orang telah ditangkap dan 150 polisi mengalami luka-luka. "Merupakan sebuah keajaiban jumlah korban tidak lebih banyak," katanya.

Seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun juga kehilangan tangan kanannya akibat ledakan granat pengendali massa di Saint-Étienne, Prancis selatan. Insiden tersebut menambah sorotan terhadap penggunaan peralatan pengendalian massa oleh aparat.

Presiden Emmanuel Macron mengecam aksi perusakan dan penjarahan. Ia menegaskan bahwa pelaku yang merusak fasilitas pemerintahan maupun tempat usaha akan dituntut dan dihukum. Di sisi lain, politikus oposisi memanfaatkan situasi menjelang pemilihan presiden pada April dan Mei 2027.

Marine Le Pen, kandidat dari sayap kanan, mengecam para perusuh dan menuduh Jean-Luc Mélenchon dari sayap kiri radikal melegitimasi kekerasan. Le Pen berjanji melindungi warga Prancis dari kekerasan sayap kiri ekstrem. Mélenchon, yang mendukung demonstrasi, meminta peserta menjauhi penjarahan dan menyebut tindakan itu bertentangan dengan cara gerakannya. (tin,ryr,rls,afp/dya)





Setop Buang Air Panas ke Wastafel, **Pipa Bisa Rusak dan Tersumbat**

Kebiasaan membuang air bekas merebus mi, telur, pasta, hingga air panas untuk membersihkan peralatan dapur tampak sepele. Setelah memasak, air sisa rebusan biasanya langsung dituang ke bak cuci piring atau wastafel agar lebih praktis. Namun, kebiasaan ini perlu diperhatikan karena air bersuhu sangat tinggi berpotensi merusak sejumlah komponen saluran pembuangan, terutama jika dilakukan berulang kali.

Dampaknya tidak selalu langsung terlihat. Pipa mungkin masih berfungsi normal setelah beberapa kali terkena air mendidih. Namun, paparan panas yang berulang dapat memengaruhi material tertentu, sementara minyak dan lemak yang ikut terbawa air berpotensi menumpuk di bagian saluran yang lebih jauh. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan risiko kerusakan dan penyumbatan.

Berisiko Merusak Pipa Plastik

Persoalan utama bukan sekadar air panas yang mengalir ke saluran, melainkan suhu yang terlalu tinggi dibandingkan kemampuan material pipa. Pipa plastik tertentu dirancang untuk penggunaan pada rentang suhu tertentu. Paparan air mendidih secara berulang berpotensi menyebabkan material mengalami perubahan

bentuk atau melemahkan bagian sambungan, bergantung pada jenis produk dan kondisi instalasinya.

Laporan Southern Living mengingatkan bahwa menuangkan air mendidih ke saluran wastafel dapat menimbulkan masalah pada sistem perpipaan rumah. Pipa PVC yang umum digunakan pada instalasi modern memiliki batas ketahanan suhu yang perlu diperhatikan.

Paparan suhu berlebihan berpotensi menyebabkan pipa melunak, berubah bentuk, atau mengalami gangguan pada sambungan.

Dalam kondisi tertentu, perubahan bentuk pipa dapat mengganggu kelancaran aliran air. Bagian pipa yang melengkung atau berubah posisi juga dapat menjadi tempat tertahannya kotoran dan sisa makanan.

Jika masalah berkembang, air bisa mengalir lebih lambat hingga akhirnya terjadi penyumbatan.

Risiko lainnya adalah kebocoran. Sambungan pipa, perekat, dan komponen penyekat dapat memiliki ketahanan panas yang berbeda dari badan pipa.

Jika komponen tersebut mengalami kerusakan, kebocoran bisa muncul di bagian yang tidak mudah terlihat, misalnya di bawah bak cuci atau di balik kabinet dapur.

Meski demikian, bukan berarti setiap kali air panas masuk ke wastafel, pipa akan langsung rusak. Risiko bergantung pada suhu air, volume yang dibuang, frekuensi paparan, jenis material, serta kondisi saluran. Hal yang perlu dihindari adalah menjadikan pembuangan air mendidih sebagai kebiasaan rutin, terlebih jika material instalasi tidak diketahui.

Air Panas Tak Hilangkan Lemak

Selain persoalan material pipa, kebiasaan membuang air panas juga berkaitan dengan penumpukan minyak dan lemak. Banyak orang mengira air mendidih dapat membersihkan saluran karena mampu mencairkan minyak yang menempel di peralatan memasak.

Padahal, lemak yang mencair belum tentu benar-benar terbuang dari sistem perpipaan. Ketika bercampur dengan air panas, minyak dapat terbawa lebih jauh ke dalam saluran.

Saat suhu turun, lemak kembali mengental atau mengeras dan menempel pada dinding pipa. Thames Water, perusahaan penyedia layanan air dan pengelolaan air limbah di Inggris, menjelaskan dalam panduan penanganan lemak, minyak, dan lemak bahwa minyak goreng tetap tidak larut dalam air, bahkan pada suhu ruang.

Minyak dapat menempel di bagian dalam pipa dan terakumulasi seiring waktu. Air panas juga tidak menyelesaikan persoalan tersebut karena lemak dapat kembali mengeras ketika bertemu bagian saluran yang lebih dingin.

Artinya, air mendidih mungkin membuat minyak terlihat lebih mudah mengalir pada awalnya, tetapi tidak menjamin saluran menjadi bersih. Justru, lemak yang terbawa ke bagian pipa yang lebih jauh dapat membentuk endapan di lokasi yang lebih sulit dijangkau.

Perhatikan Sisa Kuah

Risiko penumpukan tidak hanya berasal dari minyak goreng bekas. Kuah masakan, kaldu daging, saus, dan sisa makanan cair juga dapat mengandung lemak atau bahan yang berpotensi meninggalkan endapan.

United Utilities, pengelola layanan air dan air limbah di wilayah barat laut Inggris, mengingatkan bahwa lemak dari makanan dapat menumpuk dan memicu penyumbatan. Dalam penjelasannya mengenai pencegahan sumbatan, perusahaan tersebut menyarankan agar sisa makanan tidak dibuang ke wastafel dan minyak masak tidak dialirkan ke saluran pembuangan.

Lemak dari kuah daging, saus, atau makanan yang dimasak menggunakan minyak dapat tampak encer ketika masih panas. Namun, setelah dingin, sebagian kandungannya dapat mengental dan menempel pada dinding pipa. Sisa makanan yang ikut terbawa juga dapat memperbesar endapan.

Persoalan yang sama berlaku untuk tepung dan bahan makanan tertentu yang bercampur dengan air. Campuran tersebut dapat meninggalkan residu atau menggumpal, terutama jika masuk bersama partikel makanan lain. (far,ist/dya)

Gerhana Matahari Total 2027: Durasi 6 Menit 23 Detik

Gerhana Matahari Total (GMT) akan terjadi pada 2 Agustus 2027. Fenomena astronomi ini diperkirakan berlangsung hingga 6 menit 23 detik pada titik dengan durasi totalitas maksimum, menjadikannya salah satu gerhana Matahari total terlama yang dapat diamati dari daratan pada abad ke-21.

Menurut perhitungan astronomi, jalur totalitas gerhana akan melintasi sejumlah wilayah di Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah, termasuk Spanyol bagian selatan, Maroko, Mesir, serta Arab Saudi. Pengamat yang berada di jalur tersebut dapat menyaksikan gerhana Matahari Total.

menutupi seluruh piringan Matahari sehingga siang hari berubah gelap untuk sementara.

Salah satu lokasi yang diperkirakan menjadi tujuan pengamatan adalah Luxor, Mesir. Durasi totalitas di sekitar wilayah ini dapat mencapai 6 menit 23 detik.

Kota lain yang berada di jalur gerhana antara lain Cadiz dan Malaga di Spanyol, Tangier di Maroko, serta Jeddah dan Makkah di Arab Saudi.

Durasi gerhana berbeda-beda menurut lokasi pengamatan. Wilayah di luar jalur totalitas hanya akan mengalami gerhana sebagian, ketika Bulan

menutupi sebagian piringan Matahari.

Mengapa Istimewa

Gerhana Matahari total terjadi ketika Bulan berada di antara Bumi dan Matahari, sehingga ketiganya berada dalam posisi yang memungkinkan Bulan menutupi seluruh piringan Matahari dari sudut pandang pengamat di Bumi.

Lamanya fase totalitas dipengaruhi jarak Bumi dari Matahari, jarak Bulan dari Bumi, serta posisi pengamat terhadap jalur bayangan Bulan. Ketika Bulan tampak relatif besar dan Matahari tampak relatif kecil, durasi totalitas berpotensi lebih panjang.

Meski disebut sebagai salah satu gerhana terlama abad ini, GMT 2027 bukanlah yang paling lama sepanjang abad ke-21. Gerhana pada 22 Juli 2009 mencatat durasi totalitas maksimum sekitar 6 menit 39 detik, tetapi jalur terbaiknya terutama melintasi Samudra Pasifik. Kelly Korreck, ilmuwan program gerhana di NASA, menjelaskan keistimewaan fenomena gerhana Matahari yang dapat diamati dari Bumi.

"Sejauh ini, Bumi adalah satu-satunya planet yang kita ketahui mengalami jenis gerhana matahari seperti ini," kata Korreck, dikutip dari Euronews.

"Ada bulan-bulan lain yang melintas di depan Matahari, namun memiliki Bulan dengan ukuran dan jarak yang sempurna untuk menyaksikan ini sungguh istimewa," tambahnya. Ukuran tampak Matahari dan Bulan dari Bumi

hampir sama meskipun ukuran sebenarnya sangat berbeda. Kondisi ini memungkinkan Bulan menutupi Matahari sepenuhnya ketika keduanya berada pada satu garis pandang.

Korona Matahari Terlihat

Ketika Matahari tertutup sepenuhnya, pengamat dapat melihat korona, yakni lapisan terluar atmosfer Matahari yang tampak sepertiuntaian cahaya di sekeliling Bulan. Bintang dan beberapa planet terang juga berpotensi terlihat ketika langit mendadak gelap.

Suhu udara dapat menurun selama gerhana, tetapi besar perubahan bergantung pada cuaca dan kondisi lingkungan setempat. Masyarakat yang ingin menyaksikan fenomena ini harus memperhatikan keselamatan mata.

NASA menyarankan penggunaan kacamata khusus gerhana yang memenuhi standar ISO 12312-2. Kacamata hitam biasa tidak cukup untuk melindungi mata dari cahaya Matahari.

Perlindungan wajib digunakan selama seluruh fase gerhana sebagian. Kacamata hanya boleh dilepas ketika pengamat berada di jalur totalitas dan piringan Matahari benar-benar tertutup seluruhnya. Begitu cahaya Matahari mulai terlihat kembali, kacamata harus segera digunakan.

Untuk pengamatan menggunakan kamera, teleskop, atau teropong, diperlukan filter Matahari khusus yang dipasang di bagian depan perangkat.

Persiapan lokasi, pemantauan cuaca, dan penggunaan perlindungan yang tepat menjadi kunci agar gerhana Matahari total pada 2 Agustus 2027 dapat dinikmati dengan aman. (far/ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **SIDOARJO:** TEGUH A I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** AIS I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **TRENGGALEK:** HERLAMBAH I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Makeup Antiluntur dan Flawless saat Konser

Menonton konser musik bukan sekadar menikmati penampilan musisi favorit. Bagi banyak penggemar, acara ini juga menjadi kesempatan untuk mengekspresikan diri melalui outfit, gaya rambut, dan makeup. Persoalannya, riasan yang tampak sempurna saat berangkat belum tentu bertahan hingga konser berakhir.

Antrean panjang, cuaca panas, keringat, kelembapan udara, serta aktivitas bernyanyi dan melompat mengikuti musik dapat membuat foundation bergeser, wajah terlihat mengilap, eyeliner luntur, hingga warna lipstick memudar. Tantangan tersebut semakin terasa ketika konser berlangsung berjam-jam di ruang terbuka atau area penonton yang padat.

Karena itu, makeup tahan lama tidak cukup mengandalkan foundation berdaya tutup tinggi atau produk yang diaplikasikan berlapis-lapis. Persiapan kulit, kecocokan formula dengan jenis kulit, dan teknik pengaplikasian turut menentukan ketahanan riasan.

Dikutip dari panduan Ulta Beauty mengenai cara membuat makeup bertahan lebih lama, ada sejumlah langkah yang dapat diterapkan untuk menjaga riasan tetap segar sepanjang acara. Berikut tujuh tips makeup antiluntur yang bisa dicoba sebelum berangkat menonton konser.

Skincare Ringan

Tahap pertama dimulai sebelum makeup diaplikasikan. Pastikan kulit bersih dan terhidrasi dengan baik agar produk riasan dapat menempel lebih merata. Namun, menggunakan terlalu banyak lapisan skincare sekaligus bukan jaminan makeup akan bertahan lebih lama.

Pilih pelembap sesuai jenis kulit. Pelembap bertekstur gel atau ringan dapat menjadi pilihan bagi pemilik kulit berminyak, sedangkan kulit kering membutuhkan formula yang mampu mempertahankan kelembapan. Berikan waktu agar pelembap menyerap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Untuk konser outdoor, sunscreen juga tidak boleh dilewatkan. American Academy of Dermatology (AAD) merekomendasikan tabir surya dengan SPF minimal 30, perlindungan spektrum luas terhadap sinar UVA dan UVB, serta keterangan tahan air (water-resistant).

Sunscreen sebaiknya diaplikasikan sekitar 15 menit sebelum keluar ruangan. AAD menyarankan pemakaian ulang setiap dua jam saat berada di luar ruangan, serta setelah berenang atau berkeringat. Sunscreen tahan air pun bukan berarti perlindungannya tidak akan berkurang.

Agar riasan tidak mudah bergeser saat perlindungan matahari perlu diperbarui, siapkan metode pengaplikasian ulang yang sesuai dengan produk dan kondisi kulit.

Sunscreen berbentuk spray bisa menjadi pilihan praktis jika memang ditujukan untuk penggunaan tersebut, tetapi pastikan pemakaiannya mengikuti petunjuk label dan jumlah yang memadai. Jangan menganggap semprotan tipis di atas makeup otomatis memberikan perlindungan optimal.

Pilih Primer Sesuai Jenis Kulit

Primer dapat membantu menciptakan permukaan kulit yang lebih rata sekaligus mendukung daya tahan makeup. Namun, jenis primer perlu disesuaikan dengan kebutuhan kulit, bukan semata-mata mengikuti tren produk yang sedang populer.

Pemilik kulit berminyak dapat memilih primer dengan hasil akhir matte atau formula yang membantu mengendalikan kilap. Produk ini bisa diaplikasikan secara tipis pada area yang cepat berminyak, seperti dahi, hidung, dan dagu. Sementara itu, pemilik kulit kering dapat menggunakan primer yang membantu menjaga kelembapan agar complexion tidak terlihat pecah atau menonjolkan

tekstur kulit. Ulta Beauty menyarankan agar pelembap dibiarkan mengering terlebih dahulu sebelum primer digunakan. Setelah primer diratakan, tunggu kembali sebelum mengaplikasikan foundation atau produk complexion lainnya. Jangan mengoleskan primer terlalu tebal.

Lapisan yang berlebihan, terlebih jika formulanya tidak cocok dengan produk di atasnya, justru dapat membuat riasan menggumpal atau bergeser.

Base Makeup Ringan dan Tahan Lama

Untuk konser yang berlangsung berjam-jam, pilih base makeup dengan formula long-wear atau tahan lama. Produk berlabel transfer-resistant juga dapat membantu mengurangi perpindahan riasan ke pakaian atau benda yang bersentuhan dengan wajah, meski hasilnya tetap bergantung pada formula dan cara pemakaian.

Alih-alih menggunakan foundation dengan daya tutup tinggi di seluruh wajah, kamu bisa memilih cushion, skin tint, atau foundation ringan dengan tingkat coverage sesuai kebutuhan. Aplikasikan sedikit demi sedikit, lalu tambahkan produk hanya pada area yang memerlukan koreksi.

Jika terdapat noda bekas jerawat, kemerahan, atau lingkaran hitam di bawah mata, gunakan concealer secara selektif. Teknik ini membantu menghindari penumpukan produk yang dapat membuat riasan terlihat tebal dan cakey.

Prinsipnya, gunakan produk secukupnya. Lapisan complexion yang tipis dan merata cenderung lebih mudah dikendalikan ketika wajah mulai berkeringat dibandingkan tumpukan produk yang

terlalu tebal. dipengaruhi oleh kondisi kulit, cuaca, jumlah produk, serta aktivitas selama konser. (far,ist/dya)



Singapura Tunjuk Hidung dari Hal 1

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung berbulan-bulan tak hanya memicu kabut asap lintas negara, tetapi juga memperbesar desakan terhadap pemerintah Indonesia untuk membuka data perusahaan yang lahannya terindikasi terbakar. Di tengah sorotan Singapura dan Malaysia, persoalan transparansi konsesi, penegakan hukum, serta tata kelola perkebunan kembali menjadi perhatian.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta Presiden Prabowo Subianto membuka data perusahaan yang teridentifikasi memiliki titik panas (hotspot) dan konsesi terdampak karhutla. Menurut dia, pemerintah perlu memberikan klarifikasi atas temuan organisasi lingkungan dan klaim investigasi negara tetangga agar informasi mengenai perusahaan yang diduga terkait kebakaran tidak berhenti sebagai polemik publik.

"Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait Karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," kata Alex, Minggu (18/10/2026).

Alex juga meminta pemerintah tidak menutup diri terhadap bantuan internasional apabila penanggulangan karhutla menghadapi jalan buntu. Ia menilai, kebakaran yang berlangsung selama empat bulan dan dampak asap lintas batas seharusnya menjadi alasan untuk memperkuat kerja sama, bukan mempertahankan gengsi.

"Sudah berlangsung 4 bulan, tidak perlu malu bekerja sama dengan negara lain untuk menanggulangnya. Jauh lebih memalukan kalau jargon 'Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera' menjadi 'Hutan Terbakar, Masyarakat ISPA,'" ujarnya.

Desakan membuka data perusahaan muncul ketika Singapura menyatakan akan mengirimkan pemberitahuan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diidentifikasi terkait kebakaran penyebab kabut asap. Pemberitahuan tersebut merupakan langkah pencegahan berdasarkan dugaan keterkaitan kebakaran dengan konsesi perusahaan, bukan putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah.

Diketahui, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, mengatakan pemerintah Singapura bakal melayangkan surat pencegahan kepada 7 perusahaan di Indonesia, karena dinilai bertanggung jawab atas karhutla yang menimbulkan kabut asap yang kini menjalar ke Singapura.

Surat tersebut diterbitkan National Environment Agency (NEA) atau Badan Lingkungan Nasional yang berada di bawah Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act (THPA).

Grace Fu dalam konferensi pers yang



Berdasarkan data IQAir pada Minggu (18/10) pukul 09.00 WIB, indeks kualitas udara Jakarta mencapai 164 AQI* US.BMKG sempat menyebut sebaran asap karhutla terpantau di wilayah Jabodetabek.(ist)

digelar pada Jumat (1/10/2026), mengatakan, surat tersebut mewajibkan perusahaan mengerahkan personel untuk memadamkan api, atau mencegah penyebarannya di lahan yang dimiliki, atau dikuasai.

Ke-7 perusahaan tersebut juga diminta menghentikan atau tidak memulai aktivitas pembakaran, serta menyerahkan rencana penanganan kebakaran dan pencegahan kejadian berulang kepada NEA.

Grace Fu menyampaikan, pemerintah Singapura akan melakukan penyelidikan terhadap ke-7 perusahaan yang harus bertanggung jawab atas kabut asap lintas batas. Kini, asap tersebut mulai mencemari udara Singapura.

NEA membuka kemungkinan mengirimkan surat serupa kepada perusahaan lain dan mempertimbangkan langkah penegakan hukum tambahan, berdasarkan undang-undang (THPA), apabila ditemukan indikasi keterlibatan korporasi dalam karhutla yang menyebabkan asap lintas batas.

Grace Fu mengatakan, denda atau tuntutan pidana saat ini menjadi opsi yang sedang dipertimbangkan terkait korporasi yang terbukti memicu karhutla. Namun, untuk saat ini belum bisa dipastikan tindakan yang akan diambil Singapura terhadap ke-7 perusahaan tersebut.

"Tidak mudah. Saya yang pertama mengakui hal itu, tetapi kita harus mencoba," ujar Grace, seraya menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya melindungi masyarakat Singapura melalui langkah-langkah yang berada dalam kewenangannya.

Dari 7 perusahaan yang dituding biang kerok karhutla yang menghasilkan polusi asap hingga ke Singapura, sebanyak 4 perusahaan adalah milik Keluarga Widjaja (Sinarmas Group).

Misalnya PT Bumi Andalas Permai (BAP), PT Bumi Mekar Hijau (BMH), dan PT SBA Wood Industries tercatat sebagai pemasok Asia Pulp & Paper (APP). Dikenal sebagai bagian dari Sinarmas Group yang dikuasai Keluarga Widjaja.

Sama halnya dengan PT Bangkanesia memiliki izin hutan tanaman industri (HTI) di Kepulauan

Babel. Perusahaan ini kerap dikaitkan dengan Asia Pulp & Paper (APP), milik Keluarga Widjaja.

Sedangkan PT Paramitra Mulia Langgeng tercatat memiliki konsesi HTI di Sumatera Selatan (Sumsel), berdasarkan laporan audit sertifikasi kehutanan 2018.

Perusahaan ini merupakan anak usaha dari Sungai Budi Group (Tunas Baru Lampung), konglomerasi asal Lampung yang didirikan Keluarga Widarto dan Santoso Winata.

Pernah tersangkut kasus suap yang ditangani KPK pada 2025 yang menyeret mantan Dirut Inhutani V, Dicky Yuana Rady.

Selanjutnya, PT Sumatera Alam Anugerah terlibat dalam pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) di Kabupaten Muara Enim, Sumsel. Kendali perusahaan ini tercatat atas nama Sugeng Santoso yang datanya 'gelap'.

Sementara itu, PT Hutan Lestari Raya memiliki wilayah kerja di Kepulauan Bangka Belitung (Babel), khususnya Kabupaten Bangka Selatan. Perusahaan ini dikuasai Erik Setiawan. Datanya sama tak jelasnya.

Kemarahan publik dan pejabat Malaysia terhadap kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan, Indonesia, meluas hingga ke parlemen. Anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mendesak pemerintah mengambil langkah lebih keras terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut, termasuk mendorong negara-negara ASEAN memberikan tekanan kepada Indonesia.

"Anda harus memperlakukan mereka sebagai pihak yang dikucilkan di kawasan ini," ujar Syed Saddiq, dikutip AFP pada Minggu (18/10/2026).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia periode 2018-2020 itu juga meminta Malaysia mengirimkan nota diplomatik bersama negara-negara terdampak, termasuk Singapura, sebagai bentuk protes atas kabut asap lintas batas. Syed Saddiq turut mengusulkan tekanan finansial terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan di Indonesia. "Putus akses mereka. Hantam dompet mereka," katanya. Ia mendorong Malaysia dan Singapura menggunakan pengaruh ekonomi untuk menghentikan

Beban Kesehatan Akibat Kabut Asap

- **283.270 kasus** ISPA tercatat di wilayah terdampak pada 18 Agustus-13 Oktober 2026.
- **63.711 kasus** menimpa anak usia 0-5 tahun.
- **3.897 kasus ISPA** tercatat pada 13 Oktober 2026.
- **Rp 9,75 triliun:** estimasi biaya kesehatan dalam skenario masyarakat terdiagnosis.
- **Rp 93,56 triliun:** estimasi biaya kesehatan dalam skenario lebih luas, termasuk warga bergejala yang belum terdiagnosis.
- **1,78 juta orang:** estimasi masyarakat terdampak dalam skenario perhitungan CELIOS.

Sumber: Kementerian Kesehatan dan CELIOS.

Ribuan Titik Sumber Asap di Area Konsesi

- **6.811 titik** sumber asap teridentifikasi pada 8 Agustus-1 Oktober 2026.
- **970 titik** berada di 120 konsesi PBPH.
- **980 titik** berada di 233 konsesi perkebunan sawit.
- **1.413 titik** sumber asap teridentifikasi di Papua Selatan hingga 1 Oktober 2026.
- **294 titik** berada di area Pelepasan Kawasan Hutan yang berkaitan dengan lokasi PSN tebu.

Sumber: Greenpeace.



pendanaan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Usulan ini mencerminkan dorongan agar penanganan kabut asap tidak berhenti pada protes diplomatik.

Desakan serupa disampaikan anggota parlemen Malaysia, Syerleena Abdul Rashid. "Malaysia dan Indonesia tetangga dekat, tetapi hubungan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab," ujarnya kepada AFP. Ia mempertanyakan mengapa warga Malaysia harus terus menanggung dampak tindakan yang terjadi di luar wilayah negaranya. Pernyataan tersebut memperlihatkan meningkatnya tuntutan publik agar pemerintah Indonesia menangani karhutla secara lebih serius.

Kekecewaan juga dirasakan warga dan pelaku wisata di Malaysia. Di Batu Caves, operator tur Diddy Hamidon mengeluhkan kabut asap yang menghalangi pemandangan. "Pandangan tertutup," katanya kepada AFP, sebelum menambahkan, "Pemerintah Indonesia harus melakukan hal yang benar." (wid,ist,kum,rtr,rls/dya)



DPRD Surabaya Soroti Ruang Kelas SDN Semolowaru IV Terbatas

BAHTIYAR RIFAI MINTA PEMKOT PERCEPAT PEMETAAN SARPRAS SEMUA SEKOLAH

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat pendataan dan perbaikan sarana prasarana (sarpras) sekolah negeri. Persoalan keterbatasan ruang kelas di SDN Semolowaru IV menjadi salah satu contoh yang menurutnya perlu segera ditangani melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Di sekolah tersebut, terdapat 12 rombongan belajar (rombel), tetapi hanya tersedia delapan ruang kelas. Akibatnya, empat rombel harus mengikuti kegiatan belajar mengajar pada siang hari. Sebagian siswa juga terpaksa belajar di perpustakaan dengan duduk lesehan karena keterbatasan fasilitas.

Bahtiyar menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap koordinasi antarinstansi, terutama dalam menindaklanjuti usulan perbaikan sekolah. Ia menyebut, pengajuan perbaikan SDN Semolowaru IV telah disampaikan sejak Maret 2026, tetapi hingga September atau Oktober belum terlihat tindak lanjut yang memadai.

"Ini menjadi potret buruk koordinasi antar-OPD yang perlu diperbaiki. Kalau sudah diajukan sejak Maret, seharusnya ada tindak lanjut. Apalagi sekarang sudah mendekati pembahasan APBD 2027," ujarnya dikutip Minggu (18/10/2026).

Menurut Bahtiyar, Pemkot Surabaya perlu memetakan kondisi seluruh sekolah negeri, baik tingkat sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP). Pendataan itu diperlukan untuk mengetahui sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas, perbaikan bangunan, maupun pengadaan sarana belajar.

Ia menilai, penanganan tidak harus dilakukan dengan anggaran yang sama untuk setiap sekolah. Kebutuhan dan tingkat urgensi masing-masing sekolah perlu diverifikasi agar alokasi anggaran sesuai dengan persoalan di lapangan.

"Setiap sekolah tentu memiliki kebutuhan berbeda. Ada yang kekurangan ruang kelas, ada yang bangkunya sudah tidak layak. Semuanya perlu dicek terlebih dahulu, kemudian ditentukan mana yang paling mendesak," katanya.

Bahtiyar mencontohkan program perbaikan balai rukun warga (RW) yang pernah dilakukan Pemkot Surabaya secara serentak pada 2023. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi referensi untuk menyusun program perbaikan sarana pendidikan secara terencana dan bertahap.

Ia juga mendorong Pemkot memanfaatkan peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, perbaikan sekolah dapat



Kondisi ruang kelas di SDN Semolowaru IV yang dilaporkan warga karena dinilai tidak layak. (dok)

disinergikan melalui program pemerintah pusat maupun APBD Kota Surabaya, sesuai kewenangan dan kebutuhan masing-masing.

Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah provinsi, serta anggota DPR RI dari daerah pemilihan Surabaya untuk mengupayakan dukungan bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan.

"Kalau sarana dan prasarana sekolah bisa disinergikan antara anggaran pusat dan APBD, tentu akan lebih baik. Kita petakan dulu sekolah mana yang membutuhkan penanganan, lalu tentukan sumber anggarannya," jelasnya.

Usulkan Bentuk Tim Khusus

Bahtiyar juga mengusulkan pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, perangkat daerah terkait, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan DPRD. Tim tersebut diharapkan memiliki penanggung jawab yang jelas sehingga proses pendataan, verifikasi, penganggaran, hingga pelaksanaan perbaikan dapat berjalan lebih cepat.

Menurutnya, pembahasan APBD 2027 menjadi momentum bagi Pemkot untuk memasukkan kebutuhan perbaikan sekolah berdasarkan data yang telah diverifikasi. Dengan begitu, persoalan yang selama ini dikeluhkan sekolah tidak berhenti pada tahap pengajuan.

Ia menegaskan, perbaikan sarana pendidikan diperlukan agar seluruh siswa memperoleh lingkungan belajar yang layak. Keterbatasan ruang kelas maupun fasilitas dasar seharusnya tidak membuat sebagian siswa harus belajar dalam kondisi berbeda dibandingkan teman-temannya.

"Harapannya, anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Jangan sampai ada siswa yang belajar di kelas dengan fasilitas memadai, sementara siswa lainnya harus

lesehan di perpustakaan karena kekurangan ruang kelas," pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau SDN Semolowaru IV pada Rabu (7/10/2026). Peninjauan dilakukan setelah ia menerima laporan warga melalui hotline mengenai siswa yang terpaksa belajar di luar ruang kelas akibat keterbatasan fasilitas.

"Saya datang ke SDN Semolowaru IV untuk mengecek langsung terkait bangku dan fasilitas sekolah. Ternyata, di sini terdapat 12 rombongan belajar, tetapi ruang kelas yang tersedia hanya delapan. Akibatnya, ada empat rombel yang harus masuk siang," ujar Eri, Minggu (11/10/2026).

Selain keterbatasan ruang kelas, ia juga mendapati perpustakaan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar tidak dilengkapi bangku. Kondisi bangku dan kursi siswa yang sebagian masih terbuat dari kayu dan berlubang juga menjadi perhatian.

"Karena tidak ada ruang kelas, kegiatan belajar mengajar dilakukan di perpustakaan. Di perpustakaan juga tidak terdapat bangku, sehingga para siswa harus belajar dengan duduk lesehan," katanya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Eri meminta Dispendik mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) di sekolah negeri. Ia juga menekankan pentingnya memprioritaskan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, seperti ruang kelas dan kamar mandi.

"Daripada mengadakan berbagai kegiatan yang membebani wali murid, lebih baik anggaran diprioritaskan untuk membenahi sarana dan prasarana terlebih dahulu, seperti ruang kelas dan kamar mandi,"

tegasnya.

Menurutnya, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai penting untuk menunjang kenyamanan belajar sekaligus mendukung prestasi siswa. Karena itu, ia meminta agar kebutuhan sekolah menjadi perhatian dalam upaya pembenahan fasilitas pendidikan di Surabaya.

"Saya minta maaf karena masih ada gedung pendidikan negeri di Surabaya yang kondisinya seperti ini, padahal berada di bawah naungan Pemerintah Kota Surabaya. Fasilitas ini akan berpengaruh terhadap prestasi anak-anak. Ini anak-anak Surabaya, prestasinya harus bagus," tuturnya.

Eri pun menargetkan pembenahan seluruh SD dan SMP negeri di Surabaya pada 2027. Perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarpras sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih nyaman.

"Insyaallah pada 2027, semua sekolah negeri, baik SD maupun SMP, akan saya benahi. Jadi, anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan prestasinya juga bisa semakin baik," tutupnya. (adv/ama/dya)



Kalau sarana dan prasarana sekolah bisa disinergikan antara anggaran pusat dan APBD, tentu akan lebih baik. Kita petakan dulu sekolah mana yang membutuhkan penanganan, lalu tentukan sumber anggarannya."

Bahtiyar Rifai

Wakil Ketua DPRD Surabaya

